

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skripsi ini akan mengupas tentang strategi *Liberal Democratic Party* (LDP) Jepang untuk mengamandemen artikel 9 konstitusi Jepang di era Shinzo Abe. Seperti yang diketahui bahwa artikel 9 konstitusi Jepang membawa prinsip – prinsip baru dalam konstitusi Jepang dan harus mendasari segala pengambilan keputusan Jepang terhadap negara lain. Konstitusi 1947 sendiri memiliki tiga prinsip penting, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat, hormat terhadap hak – hak asasi manusia, serta penolakan terhadap perang.

Konstitusi yang dirubah tersebut bertujuan agar Jepang tidak lagi mempunyai potensi untuk memulai Perang, dengan cara dilumpuhkannya kekuatan militer Jepang baik darat, laut, dan udara, serta potensi yang mengancam lainnya pasca perang, dan untuk mencegah penggunaan militer dalam penyelesaian pertikaian atau konflik internasional. Di dalam konstitusi ini juga terdapat salah satu pasal yang dengan jelas dan tegas menyatakan penolakan Jepang terhadap perang, yakni artikel 9 yang berbunyi :

- (1) *Aspring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as a means of settling disputes,*
- (2) *In order to accomplish the aim of preceding paragraph, land, sea and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the State will not be recognized(Arianto, 2010).*

Sejak terbentuknya pasal tersebut, muncul banyak perdebatan terkait makna dari pasal itu, baik dari partai – partai maupun masyarakat Jepang sendiri. Bagi LDP, konstitusi pasif Jepang perlu di amandemen atas dasar perlunya afirmasi hak perlindungan diri negara dan perluasan militer Jepang. Namun, bagi beberapa partai yang tidak setuju dengan hal tersebut, memandang bahwa konstitusi pasif Jepang tersebut bisa menjadi alat untuk mencegah terjadinya perang. Upaya LDP untuk melakukan amandemen konstitusi selalu di tentang oleh partai – partai oposisi seperti *Democratic Party of Japan* (DPJ), *Constitutional Democratic Party* (CDP), dan *Japanese Communist Party* (JCP) (ISDP, 2018). Perdebatan juga muncul dari LSM dan beberapa organisasi di Jepang, seperti Asosiasi Pasal 9 yang menekankan bahwa ide artikel 9 sesuai dengan pemikiran tradisional Jepang (Shibuichi, 2017a). Di sisi lain, salah satu organisasi sayap kanan terbesar di Jepang, yakni *Nippon Kaigi* ikut membantu LDP untuk amandemen konstitusi. Sementara itu, survei yang dilakukan oleh beberapa media di Jepang, menemukan bahwa secara umum belum ada peningkatan dukungan oleh masyarakat untuk revisi, di mana masyarakat Jepang cenderung bersikap skeptis terhadap masalah revisi konstitusi.

Meskipun terdapat berbagai perdebatan tentang konstitusi pasif Jepang tersebut, LDP tetap berupaya untuk mengajukan rencana amandemen konstitusi. Upaya LDP pertama kali ialah pada tahun 1956, dengan membawa isu konstitusi ini ke Diet, ketika Diet membentuk Komisi Konstitusi (Smith, 2021). Upaya kedua yang dilakukan untuk mempertimbangkan revisi konstitusi ialah pada tahun 2000 (Smith, 2021). Dengan setiap majelis membentuk Komisi Riset Konstitusi (*Kenpo Chosakai*), yang mana terdapat beberapa kesepakatan antara LDP, *Democratic Party of Japan* (DPJ), dan *Komeito*. Pekerjaan komisi tersebut selesai pada tahun 2005, dan setiap komisi mengeluarkan *final report* ke Diet (Chinen, 2011).

Upaya LDP untuk mengamandemen artikel 9 Konstitusi Jepang diperkuat ketika Shinzo Abe kembali menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada tahun 2012(Laksono, 2018). Yang mana, pada tahun 2012, LDP mengajukan draft rancangan undang – undang yang direvisi sesuai dengan waktu dan keadaan Jepang(LibDems, 2017a). Kemudian, pada tahun 2014 Abe bersama kabinetnya dan LDP menafsirkan kembali artikel 9 Konstitusi Jepang untuk memungkinkan *Japan Self-Defense Forces* (JSDF) pertama kalinya menggunakan hak yang disetujui oleh *UN-Charter* untuk ‘*collective self-defense*’ (CSD) (A. P. Liff & Maeda, 2019a). Misalnya penggunaan kekuatan militer untuk membantu sekutu apabila diserang oleh negara lain. Selanjutnya, pada tahun 2017, Abe dan LDP tidak mengajukan perevisian teks, melainkan mengajukan penambahan klausul sesuai kebutuhan (kaken)(A. P. Liff & Maeda, 2019a). Serta pada Maret 2018, LDP kembali mengangkat isu revisi konstitusi sebagai inti dari Konvensi Partai LDP(Smith, 2021).

Bisa dilihat bahwa LDP berulang kali mengajukan proposal amandemen konstitusi, namun sulit untuk disetujui karena banyaknya perdebatan dan pertentangan oleh berbagai pihak, baik dari partai oposisi maupun masyarakat Jepang sendiri. Hal tersebut menjadikan masalah ini menarik untuk dikaji lebih dalam tentang proses aktor – aktor domestik Jepang, dalam hal ini *Liberal Democratic Party* di era Perdana Menteri Shinzo Abe mengambil peran dalam upaya untuk meningkatkan kekuatan militer Jepang, salah satunya dengan cara merevisi artikel 9 Konstitusi Jepang. Ini menjadi topik yang penting dibahas, mengingat isu keamanan merupakan isu yang sensitif dan hangat di Jepang. Serta sangat menarik untuk membahas bagaimana partai yang dominan di Jepang yakni LDP sangat ingin merevisi artikel 9 konstitusi Jepang, meskipun terdapat berbagai hambatan yang datang, baik dari partai oposisi, maupun masyarakat Jepang sendiri.

B. Rumusan Masalah

Oleh karena itu, penulis merumuskan sebuah permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : *“Mengapa Liberal Democratic Party (LDP) mengusulkan amandemen artikel 9 konstitusi Jepang”?*

C. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka penulis akan menggunakan teori nantinya akan dijadikan sebagai pegangan penelitian. Ada sejumlah ide dari beberapa tingkat analisis tentang peran politik dalam negeri dalam penyusunan politik luar negeri. Menurut penulis, fenomena kebijakan yang dibuat Jepang merupakan kebijakan dalam negeri yang ditujukan sebagai alat penyusun politik luar negeri yang dipengaruhi oleh beberapa hak mendasar sebagai berikut.

Teori Konstruktivisme

Dalam konstruktivisme, dunia sosial merupakan sesuatu yang dikonstruksi oleh manusia. Jadi, dunia sosial bukanlah sesuatu yang *given*, seperti yang digambarkan oleh kaum positivis. Konstruktivisme sangat mementingkan identitas, karena kekuatan yang dimilikinya dalam hubungan interpersonal dan hubungan internasional(Boon, 2019). Pada hakekatnya, seseorang dapat merespon objek atau aktor yang lainnya melalui makna simbolik. Abstraksi makna simbolik ini menjadi kunci dalam menggambarkan mekanisme hubungan manusia. Dalam hal ini, kita dapat melihat interaksi sosial yang terjadi pada tingkatan individu untuk menghasilkan identitas, yang dibangun dan pada gilirannya akan merekonstruksi diri sendiri dan bidang seseorang. Maksudnya ialah, interaksi merupakan bangunan dari identitas, dan dengan perluasan tanggung jawab oleh masing – masing aktornya. Oleh karena itu, konstruktivisme menekankan pada pemikiran, serta pengetahuan bersama atas dunia sosial tersebut(Nurhidayatika Shifa, 2020). Setidaknya terdapat dua gagasan kunci dalam teori konstruktivisme; *pertama*, keyakinan

bahwa struktur – struktur yang menyatukan umat manusia lebih ditentukan oleh *shared ideas* (gagasan – gagasan yang diyakini bersama) dari pada kekuatan material (Pramono & Purwono, 2010). Dan *kedua*, kepercayaan bahwa identitas dan kepentingan para aktor lebih ditentukan oleh *shared ideas* dari pada faktor – faktor alam (Pramono & Purwono, 2010). Artinya, tindakan yang dilakukan oleh aktor – aktor tersebut tidak hanya ditentukan oleh motif, alasan, dan kepentingan, akan tetapi lebih dibentuk oleh interaksi antar individu dalam lingkungan disekitarnya, seperti struktur sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Konsep konstruktivisme sesuai dengan yang dikemukakan oleh Alexander Wendt, yang terkait dengan struktur sosial menggambarkan bahwa pribadi atau kelompok tertentu bisa mengisolasi diri dari orang lain (Jackson, 2007). Oleh karena itu, mereka bisa membentuk sesuatu yang merepresentasikan “kita”. Struktur sosial menurut Wendt memiliki tiga elemen utama, yakni pengetahuan bersama, sumber daya material, dan praktik. *Pertama*, pengetahuan bersama, merupakan dimensi pengetahuan yang terkonstruksi oleh interaksi banyak aktor, yang bersifat subjektif dan sangat dinamis. Dalam kasus LDP, sikapnya yang ingin melakukan amandemen konstitusi dipengaruhi oleh identitas dari aktor – aktor yang membentuknya. Pada dasarnya, partai itu tidak homogen, melainkan terdiri dari koalisi aktor politik yang mengejar kepentingan individu. Kelompok di dalam partai ini biasa disebut dengan faksi. Faksi identik dengan kelompok yang berbagi identitas, serta tujuan yang sama, dan diorganisir untuk bertindak secara kolektif. Faksi di dalam LDP juga dilembagakan secara formal dengan identitas keanggotaan yang jelas. Terdapat beberapa faksi politik dalam tubuh LDP. Masing – masing faksi tersebut juga memiliki visi yang berbeda – beda. Hal tersebut mempengaruhi partai dalam membuat kebijakan. Dalam kasus ini, LDP sebagai sebuah partai konservatif sayap-kanan, memiliki anggota yang terikat karena keyakinan bersama. LDP yang

merupakan partai sayap-kanan Jepang, sering membuat kebijakan yang mencerminkan sikap nasionalis. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya pengaruh oleh anggota anggota LDP yang juga memiliki ideologi nasionalis. Yang mana, sebagian besar anggota LDP memiliki orientasi ideologi nasionalis, yang mengikat mereka secara kelompok. Misalnya, adanya kelompok *Nippon Kaigi*, yang merupakan organisasi sayap kanan terbesar di Jepang, di mana Abe sebagai penasihat utama, serta terdapat 16 dari 20 anggota kabinet Abe dan hampir 40% (kebanyakan anggota LDP) menjadi bagian dari organisasi tersebut(Yee, 2018).

Yang *kedua*, sumber daya material, yang merupakan fakta empirik yang bertentangan dengan pengetahuan bersama. Dalam pandangan konstruktivisme, sumber daya material itu merujuk pada kekuasaan dan kepentingan. Efek dari sumber daya material disebabkan oleh ide – ide yang membentuknya. Dengan demikian, gagasan atau ide – ide tersebut mendefinisikan makna dari kekuatan material. Elemen yang menjadi fokus konstruktivis adalah kepercayaan intersubjektif (gagasan, konsepsi, dan asumsi yang dibagikan secara luas di antara orang – orang(Jackson, 2007). Ide merupakan konstruksi mental yang dipegang oleh individu, seperangkat keyakinan, prinsip, dan sikap yang memberikan orientasi yang luas. Berdasarkan pada empat tipe ide yang dikemukakan oleh Nina Tannenwald, salah satu tipe ide yang bisa digunakan untuk menganalisis sikap LDP ialah ideologi atau sistem kepercayaan, yang merupakan seperangkat doktrin atau keyakinan sistematis yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi sosial suatu kelompok, kelas, atau budaya.

Dalam hal ini, LDP merupakan partai konservatif yang memiliki kebijakan yang mengarah pada nasionalis. Hal tersebut mencerminkan identitas yang telah di bangun oleh LDP sebagai sebuah partai. Nasionalisme merujuk pada pemikiran dan tindakan oleh politik sayap-kanan yang selaras dengan militerisme. Nasionalisme juga sering

didefinisikan sebagai keseluruhan kompleks keyakinan asumsi, kebiasaan, representasi, dan praktik yang memperkuat konsep bangsa(Boyd, 2019). Melalui definsi itu, maka kebijakan nasionalis bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan nasional, secara kolektif melalui penguatan dan perlindungan batas teritorial dan batas – batas yang mendefinsikan kelompok bangsa itu. Bagi Jepang, hal ini mengacu pada seperangkat kebijakan dan keyakinan yang memandang orang Jepang sebagai kolektif, yang dapat diukur, dan disatukan melalui berbagai pengalaman sejarah, nilai – nilai dan identitas kolektif. Faktor identitas bersama tersebut masih berlaku di Jepang, sehingga juga mempengaruhi LDP dalam memutuskan kebijakannya. Yang berarti bahwa, ide atau gagasan yang dimiliki oleh anggota nasionalis LDP mampu mempengaruhi upaya untuk mendapatkan sumber daya material.

Dan yang *ketiga*, adalah praktik atau tingkah laku aktor yang sejatinya merupakan variabel yang dipengaruhi oleh konstruksi pengetahuan yang mereka bangun sendiri secara kolektif dan bersifat sangat dinamis. Pada konteks ini, aktor – aktor tersebut menentukan identitasnya, kepentingannya, dan akhirnya tindakan dari aktor tersebut. Dengan demikian, ini menyimpulkan bahwa praktik kebijakan yang dibuat oleh LDP, salah satunya terkait usulan amandemen konstitusi merupakan variabel yang dipengaruhi oleh pengetahuan bersama antar aktor di dalam partai itu. Ini merujuk pada pengetahuan bersama yang dimiliki oleh anggota – anggota faksi di LDP yang lebih banyak memiliki ideologi nasionalis.

D. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah serta kerangka teori yang telah dipaparkan diatas, penulis membuat hipotesa sebagai berikut. Kebijakan *Liberal Democratic Party* (LDP) untuk mengusulkan amandemen konstitusi pasif Jepang terjadi dikarenakan besarnya jumlah anggota faksi politik LDP yang memiliki ideologi nasionalis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder seperti buku, jurnal, surat kabar media elektronik dan website resmi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data – data yang diambil melalui literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dilakukan dengan rentan waktu agar kajian ini lebih terfokus. Dengan alasan tersebut, penulis dapat menetapkan batasan waktu terkait sikap *Liberal Democratic Party* (LDP) dan mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhinya. Batasan waktu yang digunakan yaitu dari tahun 2012 – 2020. Batasan waktu ini dipilih karena, pada tahun 2012 merupakan tahun kembalinya Abe sebagai Perdana Menteri Jepang, dan LDP mulai mengusulkan draft amandemen konstitusi, serta pada tahun 2020, merupakan akhir dari masa jabatan Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang. Pembahasan di penelitian ini sebagian besar mencakup peran aktor – aktor di dalam LDP dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan partai tersebut, terutama terkait revisi konstitusi khususnya pada artikel 9.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun pembahasan yang dapat menjawab permasalahan dengan menggunakan sistematika penulisan, sebagai berikut :

BAB I Pada bab ini, penulis menjelaskan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Konseptual, Hipotesa, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II

Bab ini akan terdiri dari tiga sub-bab, dengan sub-bab pertama akan membahas detail mengenai penjelasan tentang dinamika reinterpretasi pasal 9 konstitusi Jepang. Hal tersebut mencakup pengertian, sejarah singkat adanya pasal 9 Konstitusi Jepang, upaya reinterpretasi pasal 9 konstitusi Jepang melalui penguatan JSDF, serta berbagai perdebatan yang muncul terkait isu reinterpretasi dan amandemen konstitusi oleh berbagai pihak. Kemudian sub-bab kedua akan menjadi pembuktian hipotesa dari pertanyaan penelitian penulis, terkait dengan alasan LDP untuk melakukan amandemen konstitusi Jepang. Dan sub-bab ketiga akan membahas tentang berbagai upaya yang dilakukan oleh LDP dalam mengusulkan amandemen konstitusi.

BAB III

Pada bab ini, berisikan kesimpulan atas pembahasan yang telah dijelaskan di bab – bab sebelumnya.